



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PEMERINTAH KOTA DUMAI KEPADA MAHASISWA DAN MAHASISWI BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU ASAL KOTA DUMAI

SKRIPSI



OLEH :

MUTIA THAHIRAH

11775201299

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN
BEASISWA PEMERINTAH KOTA DUMAI KEPADA MAHASISWA DAN
MAHASISWI BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU
ASAL KOTA DUMAI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MUTIA THAHIRAH

11775201299

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau seluruh karangannya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: **MUTIA THAHIRAH**

: **11775201299**

: **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

: **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

: **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PEMERINTAH KOTA DUMAI KEPADA MAHASISWA DAN MAHASISWI BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU ASAL KOTA DUMAI**

: **SENIN, 22 NOVEMBER 2021**

DISETUJUI OLEH

Dosen Pembimbing

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos., M. Si

NIP. 19781025 200604 1 002

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM

NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Jurusan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos., M. Si

NIP. 19781025 200604 1 002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Penelitian yang bertujuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penelitian yang mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: **MUTIA THAHIRAH**

: **11775201299**

: **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

: **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

: **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PEMERINTAH KOTA DUMAI KEPADA MAHASISWA DAN MAHASISWI BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU ASAL KOTA DUMAI**

: **SENIN, 22 NOVEMBER 2021**

Disetujui oleh :

KETUA PENGUJI

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos., M. Si

NIP. 19781025 200604 1 002

Mengetahui :

PENGUJI I

Rusdi, S. Sos., MA

NIP. 19720906 200710 1 002

PENGUJI II

Rony Jaya. S. Sos., M. Si

NIK. 130 717 060



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUTIA THAHIRAH

NIM : 11775201299

Tempat/Tgl. Lahir : DUMAI, 03 MEI 1999

Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Prodi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
PEMERINTAH KOTA DUMAI KEPADA MAHASISWA DAN MAHASISWI
BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU ASAL KOTA DUMAI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 DESEMBER 2021

Yang membuat pernyataan



Mutia Thahirah

MUTIA THAHIRAH

NIM : 11775201299

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PEMERINTAH KOTA DUMAI KEPADA MAHASISWA DAN MAHASISWI BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU ASAL KOTA DUMAI

Oleh :

Mutia Thahirah

Nim. 11775201299

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa pemerintah Kota Dumai kepada mahasiswa/i berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai dan apa saja hambatan yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini menggunakan model Van Meter dan Van Horn dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan bantuan beasiswa pemerintah Kota Dumai, dimana terdapat 6 variabel yaitu Standar/Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, Sikap (Disposisi) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode ini peneliti merangkum hal-hal penting yang akan menjadi dasar dalam pengumpulan data yang diteliti, kemudian data disajikan dan diberikan interpretasi, lalu ditarik kesimpulan serta pemberian saran. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap beserta juknis dalam pemberian beasiswa, kesulitan pendaftar mengenai BDT dikarenakan kurangnya kejelasan informasi secara menyeluruh tentang persyaratan ini, hal tersebut seharusnya dapat dicantumkan secara to the point di dalam persyaratan. Kemudian sumber daya yang masih kurang baik dalam segi apapun, karakteristik agen pelaksana yang masih belum transparan kepada mahasiswa/i pendaftar, dan juga lingkungan sosial yang belum sepenuhnya memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan kebijakan karena persyaratan yang sulit dijangkau. Hambatan yang juga dirasa dalam implementasi kebijakan ini yaitu kurangnya sosialisasi terkait BDT/DTKS kepada masyarakat, kuota penerima beasiswa yang kurang sebab keterbatasan anggaran, dan sulitnya mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar Kota Dumai dalam pengantaran berkas.

Kata Kunci: *Implementasi, kebijakan, beasiswa pemerintah Kota Dumai*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang saya hormati dan cintai Ayahanda Gusnaldi dan Ibunda Titin Yeni yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, dan kasih sayang yang tak terkira.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan masukan, nasehat, dan membimbing dengan sabar serta meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.

6. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik yang sejak memasuki perkuliahan telah memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
8. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial
9. Bapak Drs.H. Syawir Kasim, M.Si selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai
10. Bapak Harnando, SKM selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai
11. Seluruh pegawai dan staff Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai
12. Ibu Multisari Fatra, M. Pd selaku Koordinator Daerah Dinas Sosial Kota Dumai
13. Ayunda Sausan Adilah, Adinda Fajar Altharid dan Adinda Ibnu Rasyid yang merupakan saudara kandung penulis.
14. Kakanda Syaifullah, Kakanda Ardi Yahya, dan Sahabat-Sahabat saya Khofifa Ramadhani, Adelina Dwi Maharani, Siti Rohana, Tasha Gita Widayu, dan Nur Hafiza Afni yang telah membantu dan mendukung penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Teman-Teman seperjuangan lokal C Administrasi Negara UIN Suska Riau
16. *Last, but not least*. Terimakasih untuk diri sendiri yang tetap sabar, semangat, selalu percaya pada diri sendiri, dan selalu bersyukur untuk apapun yang terjadi. Terimakasih sudah memberikan yang terbaik semampu kamu dan sudah berjuang membawa sampai ke titik ini. Semoga kedepannya selalu ada hal-hal baik yang menghampiri. *Thankyou luv!! you're more than enough mut, stay healthy and be happy.*

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, November 2021

Penulis

Mutia Thahirah
NIM. 11775201277



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Implementasi	11
2.2 Kebijakan Publik.....	13
2.3 Implementasi Kebijakan.....	16
2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik	18
2.4 Beasiswa Pemerintah Kota Dumai.....	26
2.4.1 Ketentuan dan Persyaratan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai	26
2.5 Pandangan Islam tentang Pendidikan.....	28
2.6 Penelitian Terdahulu	32
2.7 Definisi Konsep.....	34

2.8 Konsep Operasional	35
2.9 Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.2.1 Jenis Penelitian	37
3.2.2 Sumber Data	38
3.3 Informan Penelitian.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Teknik Analisa Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	42
4.1 Peta Kota Dumai	42
4.2 Sejarah Kota Dumai	42
4.3 Sekretariat Daerah Kota Dumai	48
4.3.1 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai	48
4.3.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Dumai	50
4.4 Bagian Kesejahteraan Rakyat	54
4.4.1 Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat	54
4.4.2 Tugas dan Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat	54
4.4.3 Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat.....	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
5.1 Implementasi Kebijakan Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai	61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5.1.1	Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	63
5.1.2	Sumber Daya.....	66
5.1.3	Karakteristik Agen Pelaksana	74
5.1.4	Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana	77
5.1.5	Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	79
5.1.6	Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	82
5.2	Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai	86
BAB VI PENUTUP		89
6.1	Kesimpulan	89
6.2	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN.....		



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kuota Beasiswa Pemerintah Kota Dumai	5
Tabel 1.2 Jumlah pendaftar dan penerima beasiswa bagi mahasiswa/i berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai	6
Tabel 1.3 Jumlah Mahasiswa/i yang tidak lulus akibat BDT/DTKS	8
Tabel 2.1 Konsep Operasional.	34
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	38
Tabel 5.3 Anggaran Pemberian Beasiswa.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	35
Gambar 4.1 Peta Kota Dumai	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat	59
Gambar 5.1 Rapat Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas suatu negara dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas disaat ia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana sumber daya manusia di dalam negara tersebut dapat memperoleh keduanya melalui sebuah proses yaitu pendidikan.

Pendidikan merupakan pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa. Kesadaran mengenai betapa pentingnya pendidikan akan menentukan kualitas kesejahteraan dan masa depan warganya. Oleh karena itu substansi pendidikan, materi pengajaran dan metodologi pembelajaran, serta manajemen pendidikan yang akuntabel sudah seharusnya menjadi perhatian bagi para penyelenggara negara sebab negara memiliki tujuan yang hendak diwujudkan, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan mengembangkan potensinya tanpa terkecuali.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam menata, memperbaiki, dan meningkatkan pendidikan yang diharap dapat dilaksanakan oleh penyelenggara negara yaitu sebagai pelayan masyarakat, sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai mitra, dan sebagai penyandang dana. Dalam proses pendidikan tentu diperlukan dana yang cukup besar. Dan Setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan terutama bagi mereka yang kurang mampu dalam hal ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak masyarakat kurang mampu yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dalam menempuh pendidikan sebab terkendala oleh biaya pendidikan. Pemerintah yang memiliki peran sebagai penyandang dana diharapkan dapat menyediakan dana yang dapat mendukung seluruh kegiatan pendidikan yang diperlukan masyarakat sebab masyarakat yang dilayani tidak semuanya mampu, dan pada umumnya banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah harus memiliki sebuah kebijakan yang dapat mengatasi masalah tentang biaya pendidikan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat kurang mampu dalam hal membiayai pendidikannya.

Masalah yang berhubungan dengan pendidikan bukan hanya menjadi urusan pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga turut mendukung dan berkewajiban dalam hal ini. Seperti yang tercantum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat (1) yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini berarti Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat di daerah tersebut.

Pemerintah membuat kebijakan melalui program beasiswa untuk membantu para pelajar dan mahasiswa dalam mengatasi masalah biaya pendidikan agar mereka dapat meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V pasal 12 ayat 1c dan 1d, bahwa “setiap peserta didik pada setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Kebijakan yang telah dibuat harus dapat diimplementasikan atau dilaksanakan agar program-program dan tujuan yang telah dirancang dapat terealisasi dengan baik serta tercapai hasil yang diharapkan.

Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai merupakan beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu asal Kota Dumai adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun guna memenuhi kebutuhan perkuliahan. Pemberian bantuan beasiswa pemerintah Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu.

Perubahan peraturan pemberian beasiswa ini menambahkan persyaratan terkait dengan BDT (Basis Data Terpadu) atau yang kini disebut dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dimana ketentuan tersebut terdapat pada pasal 3 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Kriteria keluarga kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud adalah terdaftar pada Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.”

Pemberian bantuan beasiswa ini mempunyai prinsip yaitu untuk memberikan kontribusi positif kepada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk meningkatkan pendidikannya dan membantu meringankan beban orang tua atau mahasiswa dalam rangka memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh kebutuhan biaya yang diperlukan selama perkuliahan. Bantuan secara tunai tersebut bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa penerima beasiswa untuk keperluan yang mendukung pendidikannya seperti biaya kuliah atau biaya pembelian buku.

Anggaran dana beasiswa ini berasal dari anggaran yang diberikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yaitu 5% dari anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai. Pada Tahun 2019 anggaran beasiswa ini berjumlah Rp. 540.200.000,- dan jumlah anggaran di tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah Rp. 503.500.000,-. Besaran anggaran beasiswa ini meningkat dan menurun tergantung APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Dumai. Mengenai besaran dana bantuan beasiswa yang diberikan per mahasiswa/mahasiswi yaitu sebagai berikut.

1. Beasiswa Pendidikan

- a. Diploma 3 (D3) dalam Kota Dumai sebesar Rp. 2.000.000,-
- b. Diploma 3 (D3) luar Kota Dumai sebesar Rp. 2.500.000,-
- c. Strata 1 (S1) dalam Kota Dumai sebesar Rp. 2.500.000,-
- d. Strata 1 (S1) luar Kota Dumai sebesar Rp. 3.000.000,-

2. Beasiswa Tugas Akhir

- a. Diploma 3 (D3) dalam Kota Dumai sebesar Rp. 2.500.000,-
- b. Diploma 3 (D3) luar Kota Dumai sebesar Rp. 2.500.000,-
- c. Strata 1 (S1) dalam Kota Dumai sebesar Rp. 3.000.000,-
- d. Strata 1 (S1) luar Kota Dumai sebesar Rp. 3.500.000,-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan pemberian beasiswa pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu ini dilaksanakan berdasarkan SK (Surat Keputusan) Walikota yakni Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Seleksi Kegiatan Penyedia Beasiswa Bagi Mahasiswa/i Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai dan Surat Keputusan Walikota Tentang Besaran Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa/i Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai.

Pemberian beasiswa dari pemerintah Kota Dumai ini telah ada sejak tahun 2015, dimana sasaran bantuan beasiswa ini yaitu mahasiswa/i berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai. Namun, sebelum tahun 2018 pemberian beasiswa hanya diperuntukkan pada mahasiswa/i yang berkuliah di dalam Kota Dumai. Dan di tahun selanjutnya pemerintah memberikan beasiswa ini bukan hanya untuk mahasiswa/i asal Kota Dumai yang berkuliah di dalam Kota Dumai tetapi juga yang berkuliah di luar Kota Dumai. Berikut jumlah kuota yang diberikan per jenjang pendidikan.

Tabel 1.1 Jumlah Kuota Beasiswa Pemerintah Kota Dumai

Jenjang Pendidikan	Sasaran Bantuan Beasiswa
S1 Pendidikan dalam Dumai	60
S1 Pendidikan Luar Dumai	50
D3 Pendidikan Dumai	5
D3 Pendidikan Luar Dumai	6
S1 Tugas Akhir Dumai	15
S1 Tugas Akhir Luar Dumai	15
D3 Tugas Akhir Dumai	5
D3 Tugas Akhir Luar Dumai	5
Jumlah	161

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah kuota yang diberikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat berjumlah 161 mahasiswa/i dengan rincian seperti pada tabel 1.1. Dimana jumlah kuota ini masih sama setiap tahunnya, belum ada perubahan mengenai jumlah kuota yang diberikan.

Dalam penyelenggaraan bantuan beasiswa, berikut adalah jumlah mahasiswa/i pendaftar dan penerima beasiswa pemerintah Kota Dumai di tahun 2019-2020.

Tabel 1.2 Jumlah pendaftar dan penerima beasiswa bagi mahasiswa/i berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai

No.	Tahun	Jumlah Pendaftar	Jumlah Penerima
1.	2019	304	129
2.	2020	447	151

Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Dumai 2020

Pada Tabel 1.2 jelas menunjukkan bahwa jumlah pendaftar dan penerima mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun jumlah penerima beasiswa tidak sampai setengah dari jumlah pendaftar atau bahkan tidak memenuhi kuota yang disediakan. Hal ini juga dikarenakan ketidakterjangkauan mahasiswa/i di beberapa persyaratan beasiswa yang disediakan.

Dalam pelaksanaan program pemberian bantuan beasiswa, Kota Dumai masih mengalami beberapa masalah yaitu diantaranya terkait kejelasan *road map* pemberian beasiswa. Kurangnya kejelasan informasi yakni mengenai prosedur serta petunjuk teknis dalam pemberian beasiswa. Kemudian juga mengenai jadwal kegiatan dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa seperti apa saja tahapan-tahapan yang dilalui dan batasan waktu yang diberikan, mulai dari pengumuman mengenai hasil seleksi administratif hingga kapan dana beasiswa tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicairkan. Hal ini membuat mahasiswa/i pendaftar menjadi bingung dan tidak mengetahui tentang batasan-batasan waktu dan tahap-tahap yang diberikan. Mahasiswa pendaftar beasiswa hanya bermodalkan informasi dari mahasiswa lainnya atau mahasiswa yang lulus beasiswa di tahun sebelumnya, sehingga mereka hanya bisa menunggu tanpa kepastian dari pemerintah.

Selanjutnya, permasalahan yang juga membuat mahasiswa/i Asal Kota Dumai merasa tidak puas yaitu mengenai persyaratan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai, dimana masih banyak mahasiswa yang tergolong kurang mampu tidak lulus diakibatkan tidak terdaftarnya data mereka pada Basis Data Terpadu (BDT) yang merupakan salah satu syarat di dalam pemberian bantuan beasiswa ini.

BDT atau yang kini disebut dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dimana DTKS ini menjadi acuan dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. Dasar pelaksanaan DTKS saat ini yaitu Peraturan Menteri Sosial RI No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Berikut adalah tabel jumlah mahasiswa yang tidak lulus administrasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai yang diakibatkan tidak terdaftarnya di Basis Data Terpadu (BDT).

Tabel 1.3 Jumlah mahasiswa yang tidak lulus akibat BDT/DTKS

No.	Tahun	Jumlah Pendaftar	Jumlah Mahasiswa yang tidak lulus akibat BDT
1.	2019	304	151
2.	2020	447	148

Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Dumai 2020

Spesifikasi persyaratan beasiswa mengenai BDT ini tidak terjangkau oleh sebagian besar dari mahasiswa yang kurang mampu atau yang berhak untuk mendapatkan beasiswa.

Seharusnya dalam pengimplementasian program pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai ini terdapat kejelasan dalam proses pemberian beasiswa serta dapat memberikan manfaat dan kepuasan bagi mahasiswa yang membutuhkan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan beasiswa itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Dumai dengan Judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa pemerintah kota dumai kepada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa pemerintah kota dumai kepada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa pemerintah kota dumai kepada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa pemerintah kota dumai kepada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa pemerintah kota dumai kepada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai.
2. Bagi Lokasi Penelitian
Hasil penelitian dapat dijadikan atau menjadi sumbangan pemikiran dalam memperbaiki dan memecahkan permasalahan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa pemerintah kota dumai kepada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang menyangkut referensi dan buku-buku sesuai permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini penulis membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian tentang bagaimana implementasi bantuan beasiswa pemerintah Kota Dumai dan apa saja hambatan yang terjadi.

BAB VI Penutup

Pada bab ini peneliti menyajikan kesimpulan dan saran-saran dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan secara etimologis pengertian implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat tersebut dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016: 134-135) yang mengatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Kemudian penjelasan mengenai implementasi menurut Daniel A mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab, 2014 :135-136), makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Selanjutnya menurut Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2014) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Peter S. Cleaves dalam Solichin Abdul Wahab (2014) juga mengemukakan pandangan yang sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn, ia secara tegas menyebutkan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang Dalam ilmu kebijakan public disebut “*policy delivery system*” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau saran-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengatakan bahwa implementasi adalah system rekayasa. Dan Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Dalam kerangka sistem,

implementasi adalah proses konversi yang mengubah *input* (kebijakan, tujuan, dan sarana) menjadi *output* dan *outcomes* (Sahya Anggara, 2014 : 158).

Huntington dalam Mulyadi (2015:24) mengatakan bahwa perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah polibiro, kabinet atau presiden negara itu.

2.2 Kebijakan Publik

Heidenheimer, *et. al* dalam Winarno (2016) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan studi tentang ‘bagaimana, mengapa, dan apa konsekuensi’ dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pendapat Iskandar (2012), kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Mulyadi (2015:37) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi kesalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam suatu kebijakan tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian James E. Anderson (Indiahono, 2016:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Thoha (2012) memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.

Kebijakan publik sebagai pengaruh (*impact*) dari aktifitas pemerintah (Easton dalam Leo Agustino, 2016: 16). Winarno (2007) mendefinisikan kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi rakyat pada tingkat strategis atau garis besar yang dibuat oleh otoritas publik. Lebih lanjut, kebijakan publik diartikan sebagai tindakan yang diusulkan dari seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang, dimana kebijakan tersebut diusulkan untuk digunakan dan diatasi sebagai upaya mencapai dan mewujudkan suatu tujuan atau maksud (Friedrick mengutip Winarno : 2007)

Secara singkat Thomas R. Dye (dalam Solichin, 2014) mendefinisikan kebijakan publik ialah “*whatever governments choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Menurut James E. Anderson (Nugroho, 2014 : 4) Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku dalam memecahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masalah atau suatu persoalan tertentu. Dari pengertian kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa dalam kebijakan terkandung 4 (empat) unsur pokok, yaitu :

1. Adanya serangkaian tindakan.
2. Adanya tujuan yang hendak dicapai .
3. Adanya pelaku dari kebijakan tersebut
4. Adanya masalah yang hendak diselesaikan.

Lebih lanjut mengenai kebijakan publik dinyatakan oleh Solichin A. Wahab (2014), bahwa :

- a. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan
- b. kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri
- c. kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa.

Kebijakan merupakan salah satu pendekatan yang penting untuk memberikan perbaikan dalam setiap administrasi publik dan pelayanan publik (Ahmad Antory Hussein: 2008), dimana studi Kebijakan Publik telah menjadi perhatian khusus perencanaan di dalam penyusunan agenda dan proses perumusan kebijakan. (Fischer: 2003)

2.3 Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Kemudian menurut Chief J.O. Udoji yang dikutip oleh Agustino (2014:140), implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.

Dalam kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2008: 64) merumuskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (memimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan publik adalah tahap dimana kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah (Winarno, 2016: 31-32). Lester dan Steward dalam Winarno (2016:134) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Selanjutnya dikatakan bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Lebih lanjut Dwidjowijoto (Arifin Tahir, 2015: 98) mengatakan bahwa pada prinsipnya ada empat “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal pencapaian efektivitas implementasi kebijakan.

1. Kebijakan itu sendiri sudah tepat
2. Tepat pelaksanaannya
3. Tepat target

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tepat lingkungan

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas suatu implementasi program atau kebijakan sangat ditentukan oleh pelaku birokrasi pelaksanaannya dan perilaku akan dipengaruhi oleh lingkungan dimana kebijakan itu dilaksanakan.

Menurut Winarno (2007) Efektivitas implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Perilaku Birokrasi pelaksana
2. Lingkungan Kebijakan
3. Pelaksanaannya memerlukan mekanisme dan prosedur kelembagaan
4. Pelaksana langkah-langkah dasar dan tujuan kebijakan yang konsisten
5. Adanya inovasi dari pelaksana

2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III (dalam Riant Nugroho, 2015: 225) isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tnpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil di lakukan

Pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). Dalam pendekatan yang diterapkan oleh Edward III (Leo Agustino, 2016: 137-141) terdapat empat variabel yang

sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Variabel pertama yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi. Menurutnya, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi.

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016 : 138) dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu staf, informasi, dan wewenang.

3. Disposisi atau Sikap dari Pelaksana

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Menurut Edward III, hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III adalah efek disposisi, melakukan pengaturan birokrasi, dan insentif.

4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat, menurut George C. Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik dalam birokrasi yaitu membuat standar operating procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Agustino, 2016 : 146) mereka berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Karakteristik Masalah (Variabel Independen), mudah tidaknya masalah yang akan di garap.
 - a. Kesulitan Teknis
 - b. Keberagaman Perilaku kelompok sasaran
 - c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
 - d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
2. Karakteristik Kebijakan (Variabel Interventing). Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.
 - a. Kejelasan dan Konsistensi
 - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
 - c. Ketepatan alokasi sumber dana
 - d. Keterpaduan hirarki
 - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan pelaksana
 - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan
 - g. Akses formal pihak-pihak luar
3. Variabel di Luar Kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi
 - a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
 - b. Dukungan publik
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
 - d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merilee S. Grindle (dalam Riant Nugroho, 2015: 221) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya. Mengenai isi kebijakan terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan, serta sumber daya yang dihasilkan. Kemudian mengenai konteks, ada 3 (tiga) variabel utama yang harus diperhatikan yaitu kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat, karakter institusi, dan tingkat kepatuhan.

Ada enam variabel, menurut Van Metter & Carl van Horn (dalam Leo Agustino (2016:133-136) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan publik dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Identitas indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam menganalisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan di dalam keberhasilan implementasi kebijakan ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia namun jika terbentur masalah dana atau waktu maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan publik.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen dilibatkan.

Dalam melihat karakteristik agen pelaksana, Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016:166) mengatakan bahwa pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi dapat diartikan sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola pola hubungan yang yang terjadi berulang ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang yang demokratis dan persuasif (Van Meter Horn dalam Agustino 2016).

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari para pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. kemudian Van Meter dan Horn mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan

komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2.4 Beasiswa Pemerintah Kota Dumai

Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu asal Kota Dumai adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun guna memenuhi kebutuhan perkuliahan dalam rangka wujud kepedulian pemerintah di bidang pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi akademis dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Dasar Hukum pemberian bantuan beasiswa pemerintah ini yaitu Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu asal Kota Dumai

2.4.1 Ketentuan dan Persyaratan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai

A. Prinsip Beasiswa

- a. Memberikan kontribusi positif kepada mahasiswa dan Mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk meningkatkan pendidikannya.
- b. Membantu meringankan beban orang tua/mahasiswa dalam rangka memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan biaya yang diperlukan selama perkuliahan seperti biaya buku dan/atau biaya kuliah .
- c. Beasiswa diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan jumlah penerima bersifat terbatas dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

B. Kriteria Penerima Beasiswa

Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa dan Mahasiswi dengan kriteria:

- a. Mahasiswa/i penduduk Kota Dumai dari Keluarga kurang mampu secara ekonomi.
- b. Memenuhi persyaratan dan telah lulus seleksi sebagaimana pada Lampiran Surat Edaran ini.
- c. Mengikuti pendidikan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Mahasiswa/i Tidak sedang menerima Beasiswa lain.

C. KATEGORI BEASISWA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. BEASISWA PENDIDIKAN diberikan kepada Mahasiswa/I yang tidak sedang melakukan penelitian/tugas akhir, pada jenjang pendidikan :
- Diploma Tiga (D3) di Kota Dumai
 - Diploma Tiga (D3) di Luar Kota Dumai
 - Srata Satu (S1) di Kota Dumai
 - Srata Satu (S1) di Luar Kota Dumai
- b. BEASISWA TUGAS AKHIR diberikan kepada Mahasiswa/i yang sedang melakukan penelitian/tugas akhir, pada jenjang pendidikan :
- Diploma Tiga (D3) Dumai
 - Diploma Tiga (D3) Luar Dumai
 - Srata Satu (S1) Dumai
 - Srata Satu (S1) Luar Dumai

Setiap pendaftar harus melampirkan surat keterangan kurang mampu dari kelurahan (asli) sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai pada pasal 3 ayat 2 point a dan b.

2.5 Pandangan Islam tentang Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana dan kebutuhan untuk menciptakan manusia yang berpengetahuan luas serta berbudi pekerti mulia. Islam begitu menganggap penting ilmu pengetahuan. Allah menyeru untuk memperdalam ilmu pengetahuan, karena kedudukan orang-orang yang berpendidikan sangat dimuliakan bahkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. At-Taubah: 122 dan QS. Al-Mujadilah: 11

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadannya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah: 122)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: “berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah: 11)

Istilah pendidikan yang umum digunakan dalam pendidikan islam mengacu pada 3 istilah yaitu al-tarbiyah, al-ta’lim, dan al-ta’dib.

a. Al-Tarbiyah

Tarbiyah berasal dari kata dasar rabba yurrabbi menjadi tarbiyah yang mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik. Artinya pendidikan (tarbiyah) merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. “Rabb” merupakan suatu gambaran yang diberikan kepada suatu perbandingan antara Allah sebagai pendidik dan manusia sebagai peserta didik. Pada hakikatnya merujuk kepada Allah selaku Murabby (pendidik) sekaligus alam. Kata Rabb sering dikaitkan dengan kata alam, sesuatu selain Tuhan. Pengkaitan kata Rabb dengan kata alam tersebut seperti pada surat Al-A’raf ayat 61:

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Nuh menjawab: Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikitpun tetapi aku adalah utusan Tuhan semesta alam.”

Kemudian kata Rabb (Tuhan) dan Murabby (pendidik) berasal dari akar kata seperti termuat dalam ayat al-Qur’an:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (Q.S. Al-Israa:24).

Menurut Samsul Nizar menjelaskan kata al-tarbiyah mengandung arti mengasuh, bertanggung jawab, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan dan memproduksi baik yang mencakup kepada aspek jasmaniah maupun rohaniah (Samsul Nizar, 2001, 87).

Kemudian Syed Naquib Al-Attas menjelaskan bahwa al-tarbiyah mengandung pengertian mendidik, memelihara menjaga dan membina semua ciptaan-Nya termasuk manusia, binatang dan tumbuhan (Jalaluddin, 2003: 115).

b. Al-Ta'lim

Ta'lim yang berasal dari kata 'allama, dimana ta'lim diterjemahkan dengan pengajaran. Dalam kaitan pendidikan ta'lim dipahami sebagai sebagai proses bimbingan yang dititik beratkan pada aspek peningkatan intelektualitas peserta didik (Jalaluddin, 2003: 133). Proses pembelajaran ta'lim secara simbolis dinyatakan dalam informasi al-Qur'an ketika penciptaan Adam AS oleh Allah Swt. Adam As sebagai cikal bakal dari makhluk ber peradaban (manusia) menerima pemahaman tentang konsep ilmu pengetahuan langsung dari Allah Swt, sedang dirinya (Adam As) sama sekali kosong. Sebagaimana tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 31 dan 32:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." (QS. Al-Baqarah: 31)

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Artinya: " Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah: 32)

c. Al- Ta'dib

Ta'dib berasal dari kata *addaba*, *yuaddibu*, *ta'diban*. Kata *al-ta'dib* diartikan kepada proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti peserta didik (Samsul Nizar, 2001: 90).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta'dib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun. *Ta'dib* seakar dengan adab memiliki arti pendidikan, peradaban atau kebudayaan. Artinya orang yang berpendidikan adalah orang yang berperadaban, dimana peradaban yang berkualitas bisa diraih melalui proses pendidikan.

Kata *ta'dib* tidak dijumpai langsung dalam al-Qur'an, tetapi pada tingkat operasional, pendidikan dapat dilihat pada praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul sebagai pendidik agung dalam pandangan pendidikan Islam, sejalan dengan tujuan Allah mengutus beliau kepada manusia yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Allah juga menjelaskan, bahwa sesungguhnya Rasul adalah contoh teladan bagi kamu sekalian. Sebagaimana dikatakan Allah dalam Q.S. Al-Ahzab: 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Persepektif islam mengenai pendidikan dan betapa pentingnya pendidikan juga tertuang di dalam salah satu hadits, dimana disebutkn bahwa “*Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah).*” (HR. Ibnu Majah)

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai pendukung dan referensi untuk melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dahlena Dewi Fitri dengan judul **Peran Pemerintah Daerah dalam Sektor Pendidikan: (Bantuan Beasiswa terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2016)**. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa dalam segi anggaran untuk bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu terutama bagi sektor pendidikan mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi masih dirasa kurang memadai, dikarenakan jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah masih bersifat fluktuatif di setiap tahun anggarannya. Dalam hal penyaluran bantuan masih banyak ditemui kecurangan dan bantuan tidak tepat sasaran, terutama dalam segi pengawasan dan seleksi penerimaan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Johannes Kristoffel Santie dan Agus Wahono dengan judul **Implementasi Kebijakan Program Bantuan Beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado**. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa kualitas implementasi kebijakan program bantuan beasiswa bidikmisi di Politeknik Negeri Manado berlangsung dengan sangat baik. Hal itu dapat diukur melalui jumlah pelamar yang setiap tahun bertambah dan juga jumlah penerima yang selalu melebihi kuota yang ditetapkan oleh Dikti.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dengan judul **Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2010-2014 (Studi Penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang)**. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa secara umum implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi selama kurun waktu 5 tahun di Universitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang telah berjalamlah cukup baik. Namun pelaksanaan beasiswa bidikmisi secara sistem masih kurang terorganisir dengan baik. Selain itu komunikasi antar pelaksana dan kelompok sasaran masih kurang.

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun 2006:33). Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2014: 139)
2. Kebijakan publik ialah “*whatever governments choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). (Thomas R. Dye dalam Solichin, 2014)
3. Beasiswa Pemerintah Kota Dumai merupakan beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu asal Kota Dumai adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun guna memenuhi kebutuhan perkuliahan dalam rangka wujud kepedulian pemerintah di bidang pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi akademis dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi kebijakan	1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan	Sejauh mana standar/ ukuran dan tujuan dalam implementasi kebijakan
	2. Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia 2. Sumber Daya Finansial 3. Sumber Daya Waktu
	3. Karakteristik Agen Pelaksana	Ciri-ciri/ sifat dari badan/ instansi pelaksana
	4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana	1. Kognisi/ Pemahaman tentang Kebijakan 2. Tanggapan Kebijakan (Penerimaan/ penolakan) 3. Intensitas Tanggapan
	5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivis Pelaksana	Koordinasi dan Komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi
	6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	Sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan implementasi kebijakan

Sumber: Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi suatu kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2016: 133-136)

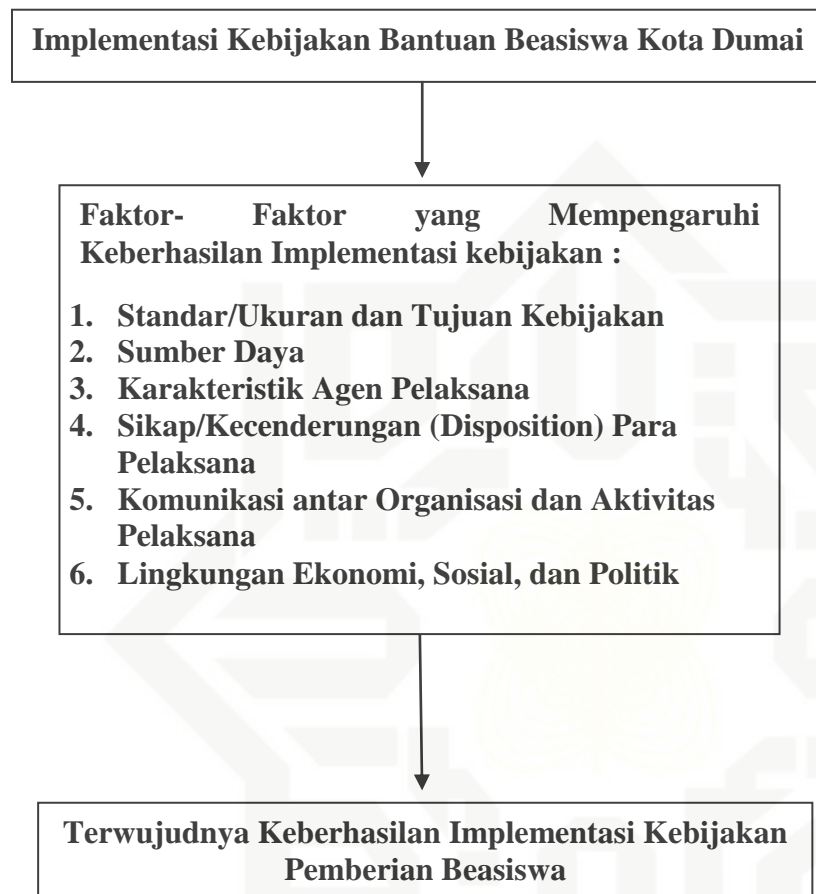
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.9 Kerangka berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah atau proses mencari data yang dilakukan secara sadar untuk menemukan kebenaran dan menguji suatu masalah, dan memerlukan metode penelitian yang sesuai dengan apa yang akan diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Dumai. Penelitian ini dimulai dari bulan Januari hingga November 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu kualitatif.

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena metode ini merupakan langkah yang paling tepat digunakan untuk menentukan hasil dalam penelitian ini dan dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat suatu permasalahan untuk penelitian generalisasi (Sandu Siyoto, 2015).

Menurut Creswell (2013:4-5) metode penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.

3.2.2 Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Hasan (2002: 82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Hasan, 2002: 58). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari website resmi pemerintah Kota Dumai dan dokumen pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai.

3.3 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Moleong, 2015:163). Teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampling untuk menentukan *key informan* yang dianggap mengetahui dengan benar mengenai permasalahan penelitian. Adapun yang akan menjadi informan di dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Syawir Kasim, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai
2.	Harnando, SKM	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
3.	Ratna Nurwijayanti	Pendaftar Beasiswa
4.	Andre Pantano	Pendaftar Beasiswa
5.	Apri Yuda Kusuma	Pendaftar Beasiswa

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2006:180). Berpedoman dengan draft wawancara, peneliti secara langsung akan melakukan wawancara dengan informan penelitian yang dianggap paham dan mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.

3.4.2 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2007:231) dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, arsip, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini

yaitu berupa berkas Peraturan Walikota Dumai, Keputusan Walikota Dumai, Surat edaran, Rencana Anggaran Belanja beasiswa, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai BDT/DTKS.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009: 224) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011 : 247-252) ada tiga komponen pokok dalam analisis data, yakni:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti Merangkum, Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

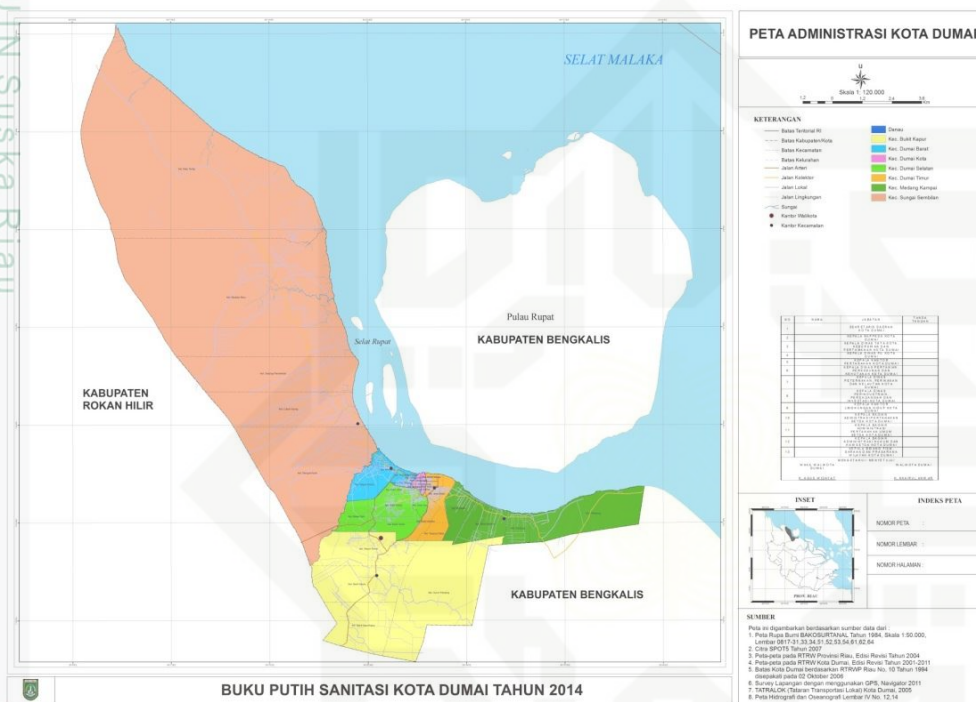
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Peta Kota Dumai

Gambar 4.1 Peta Kota Dumai



4.2 Sejarah Kota Dumai

Pada awalnya Kota Dumai merupakan sebuah dusun kecil yang kemudian berkembang menjadi sebuah desa dan dihuni oleh para nelayan. Pada tahun 1959 status Kota Dumai ditingkatkan menjadi kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Bengkalis. Dan di tahun 1979 status pemerintahan Dumai ditingkatkan dari kecamatan menjadi Kota Administratif berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 08 Tahun 1979 pada tanggal 11 April 1979 di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (DAT) II Bengkalis. Dimana Dumai merupakan kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administratif ke-11 di Indonesia dan pertama di Sumatera.

Pertumbuhan dan pembangunan Kota Dumai semakin pesat sehingga kota administratif Dumai ditingkatkan status pemerintahannya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829). Pada awal terbentuk, Kota Dumai terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat; Dumai Timur; dan Bukit Kapur, 13 Kelurahan, dan 9 Desa dengan jumlah penduduk 15.669 jiwa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Kotamadya Dumai diubah menjadi Kota Dumai. Pada saat itu jabatan walikota pertama dimulai dari tanggal 27 April 1999, sehingga tanggal 27 April dijadikan sebagai hari lahir Kota Dumai. Di tahun 2001 Kota Dumai memekarkan 2 kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bukit Kapur yaitu kecamatan Medang Kampai dan kecamatan Sungai Sembilan, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai No. 18 tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai, sehingga Kota Dumai terdiri dari 5 (lima) kecamatan. Kemudian melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009, hingga saat ini Kota Dumai sudah memiliki 7 (tujuh) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan.

A. Kecamatan Dumai Kota, terdapat 5 (lima) kelurahan :

1. Kelurahan Dumai Kota
2. Kelurahan Sukajadi
3. Kelurahan Bintan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rimba Sekampung
5. Kelurahan Laksamana

B. Kecamatan Dumai Timur, terdapat 5 (lima) Kelurahan :

1. Kelurahan Tanjung Palas
2. Kelurahan Jayamukti
3. Kelurahan Bukit Batrem
4. Kelurahan Teluk Binjai
5. Kelurahan Buluh Kasap

C. Kecamatan Dumai Barat, terdapat 4 (empat) Kelurahan :

1. Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan
2. Kelurahan Pangkalan Sesai
3. Kelurahan Purnama
4. Kelurahan Bagan Keladi

D. Kecamatan Dumai Selatan, terdapat 5 (lima) Kelurahan :

1. Kelurahan Bumiayu
2. Kelurahan Bukit Datuk
3. Kelurahan Bukit Timah
4. Kelurahan Ratu Sima
5. Kelurahan Mekar Sari

E. Kecamatan Bukit Kapur, terdapat 5 (lima) Kelurahan :

1. Kelurahan Bagan Besar
2. Kelurahan Kayu Kapur
3. Kelurahan Bukit Nenas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Kelurahan Kampung Baru
5. Kelurahan Gurun Panjang

F. Kecamatan Medang Kampai, terdapat 4 (empat) Kelurahan :

1. Kelurahan Pelintung
2. Kelurahan Guntung
3. Kelurahan Teluk Makmur
4. Kelurahan Mundam

G. Kecamatan Sungai Sembilan, terdapat 5 (lima) Kelurahan :

1. Kelurahan Bangsal Aceh
2. Kelurahan Lubuk Gaung
3. Kelurahan Tanjung Penyembal
4. Kelurahan Basilam Baru
5. Kelurahan Batu Teritip

Filosofis dasar peningkatan status pengelolaan wilayah administrasi pemerintah adalah untuk memperpendek rentang kendali dan mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi yang sangat menjanjikan.

Dengan batas berdasarkan aspek administratif, wilayah Kota Dumai mencakup wilayah daratan seluas ± 204.674 hektar, wilayah perairan seluas ± 71.393 hektar, serta wilayah udara dan wilayah dalam bumi. Kemudian, Kota Dumai Juga memiliki 15 sungai besar dan kecil yang total panjang keseluruhannya yaitu 221 Km, dimana seluruh sungai bermuara ke Selat Malaka dan Selat Rupat yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan. Terdapat 3 (tiga)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
Ste Iam: University of Sultan Syarif Kasim Riau

sungai terpanjang di Kota Dumai yaitu Sungai Senepis, Sungai Bulu Hala, dan Sungai Masjid. Berikut nama-nama sungai yang terdapat di Kota Dumai :

1. Sungai pelintung (8.5 Km)
2. Sungai Kepala Beruang (5 Km)
3. Sungai Selinsing (4 Km)
4. Sungai Tanjung Leban (3 Km)
5. Sungai Merambung (7 Km)
6. Sungai Kemeh (10 Km)
7. Sungai Masjid (29 Km)
8. Sungai Nerbit (12 Km)
9. Sungai Mampu (13 Km)
10. Sungai Teras (10 Km)
11. Sungai Bulu Hala (40 Km)
12. Sungai Geniut (12 Km)
13. Sungai Santaula (22 Km)
14. Sungai Senepis (35 Km)
15. Sungai Teluk Dalam (10 Km)

Kemudian mengenai para pemimpin di Kota Dumai, dimana Walikota administratif dalam penyelenggaraan pemerintah di Kota Dumai yaitu **Wan Dahlan Ibrahim, Drs. H. Rusli Idar, H. Fadlah Sulaiman, S.H., Drs. H. Azwin Yacob dan Drs. H. Zainuddin Abdullah. Setelah terbentuknya Kota Dumai hingga kini** Kota Dumai telah dipimpin oleh beberapa tokoh yang dipercayai untuk menjalankan amanah rakyat. Tokoh-tokoh tersebut yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. **Drs. H. Zainuddin Abdullah**, yang menjabat sebagai Walikota Dumai sejak tanggal 27 April 1999 s.d tanggal 27 April 2000
2. **Drs. H. Wan Syamsir Yus**, yang menjabat sebagai Walikota dan **H. Suarman AR** sebagai Wakil Walikota Dumai Priode tanggal 27 April 2000 s.d 27 April 2005
3. **Ir. H. Nasrul Effendi, M.T.**, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Walikota Dumai mulai tanggal 28 April 2005 s.d 12 Agustus 2005
4. **Drs. H. Zulkifli As, M.Si.**, yang menjabat sebagai Walikota Dumai dan **dr. H. Sunaryo** menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2005-2010 terhitung tanggal 12 Agustus 2005 s.d 12 Agustus 2010
5. **H. Khairul Anwar, S.H.**, yang menjabat sebagai Walikota Dumai dan **dr. H. Agus Widayat, M.M.** menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2010-2015 terhitung tanggal 12 Agustus 2010 s.d 12 Agustus 2015.
6. **Drs. H. Arlizman Agus**, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Walikota Dumai mulai tanggal 12 Agustus 2015 s.d 27 Februari 2016.
7. **Drs. H. Zulkifli AS, M.Si.**, yang menjabat sebagai Walikota Dumai dan **Eko Suharjo, S.E.** menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2016-2021 terhitung tanggal 27 Februari 2017 s.d 18 November 2020.
8. **H. Jonli, S.Sos, M.Si**, yang menjabat sebagai Penjabat Walikota Dumai mulai tanggal 28 Januari 2021 s.d 26 Februari 2021.
9. **H. Paisal, SKM, MARS**, yang menjabat sebagai Walikota Dumai dan **H. Amris, S.Sy** menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2021-2024 terhitung tanggal 26 Februari 2017 s.d sekarang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Sekretariat Daerah Kota Dumai

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota.

4.3.1 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai, terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas : Subbagian Administrasi Pemerintahan, Subbagian Administrasi Kewilayahan, dan Subbagian Otonomi Daerah.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas : Subbagian Bina Mental Spiritual, Subbagian Kesejahteraan Sosial, dan Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

3) Bagian Hukum, terdiri atas : Subbagian Perundang-Undangan, Subbagian Bantuan Hukum, dan Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

4) Bagian Kerjasama, terdiri atas : Subbagian Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri, Subbagian Fasilitas Kerjasama Luar Negeri, dan Subbagian Evaluasi Kerjasama.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1) Bagian Perekonomian, terdiri atas : Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

- 2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas : Subbagian Penyusunan Progran, Subbagian pengendalian Progran dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas : Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Subbagian Pengelolan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 4) Bagian Sumber Daya Alam, terdiri atas : Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian; Kehutanan; Kelautan; dan Perikanan, Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup, dan Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari beberapa bagian yaitu :
- 1) Bagian Umum, terdiri atas : Subbagian Tata Usaha Pimpinan; Staf Ahli; dan Kepegawaian, Subbagian Perlengkapan, dan Subbagian Rumah Tangga.
 - 2) Bagian Organisasi, terdiri atas : Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas : Subbagian Protokol, Subbagian Komunikasi Pimpinan, dan Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

- 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas : Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Pelaporan.
5. Staf Ahli Walikota

4.3.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Dumai

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah dibantu oleh beberapa Asisten, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, dan kerjasama
 - 2) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat
 - 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, dan kerjasama
 - 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, dan kerjasama yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya alam
 - 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya alam
 - 3) Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa
 - 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa
 - 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya alam.
3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi
- 6) Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Masing-masing Asisten dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan hirarkinya. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik, baik di

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

4.4 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian dan berada di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan Rakyat dikepalai oleh kepala bagian dan memiliki 3 (tiga) sub bagian.

4.4.1 Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

1. Subbagian Bina Mental Spiritual
2. Subbagian Kesejahteraan Sosial
3. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat

4.4.2 Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas, yaitu :

- a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat
- b. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat
- c. Menyusun bahan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat
- d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat
- f. Meneliti berkas permohonan bantuan dan mengendalikan pelaksanaan pemberian bantuan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat
- h. Membuat rencana anggaran kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat
- i. Membina dan memotivasi bawahan/pegawai serta memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai dalam rangka peningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- j. Memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian maupun Pelaksana di Bagian Kesejahteraan Rakyat
- k. Mengevaluasi hasil kerja Sub Bagian sesuai program dan langkah kerja yang telah ditentukan
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

A. Subbagian Bina Mental Spiritual

Subbagian Bina Mental Spiritual memiliki tugas, yaitu :

- a. Menyiapkan tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
- e. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan daerah di bidang lembaga dan kerukunan keagamaan

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga dan kerukunan umat beragama
- h. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama
- i. Menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan
- j. Melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan
- k. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan
- l. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan
- m. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan
- n. Melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan
- o. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan.

B. Subbagian Kesejahteraan Sosial

Subbagian Kesejahteraan Sosial memiliki tugas, yaitu :

- a. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- e. Menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat
- f. Menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- g. Menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi
- h. Melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigran
- i. Melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigran dari daerah asal ke transit Kabupaten, Provinsi dan lokasi transmigrasi
- j. Menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Organisasi Masyarakat, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga
- k. Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Organisasi Masyarakat, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga.

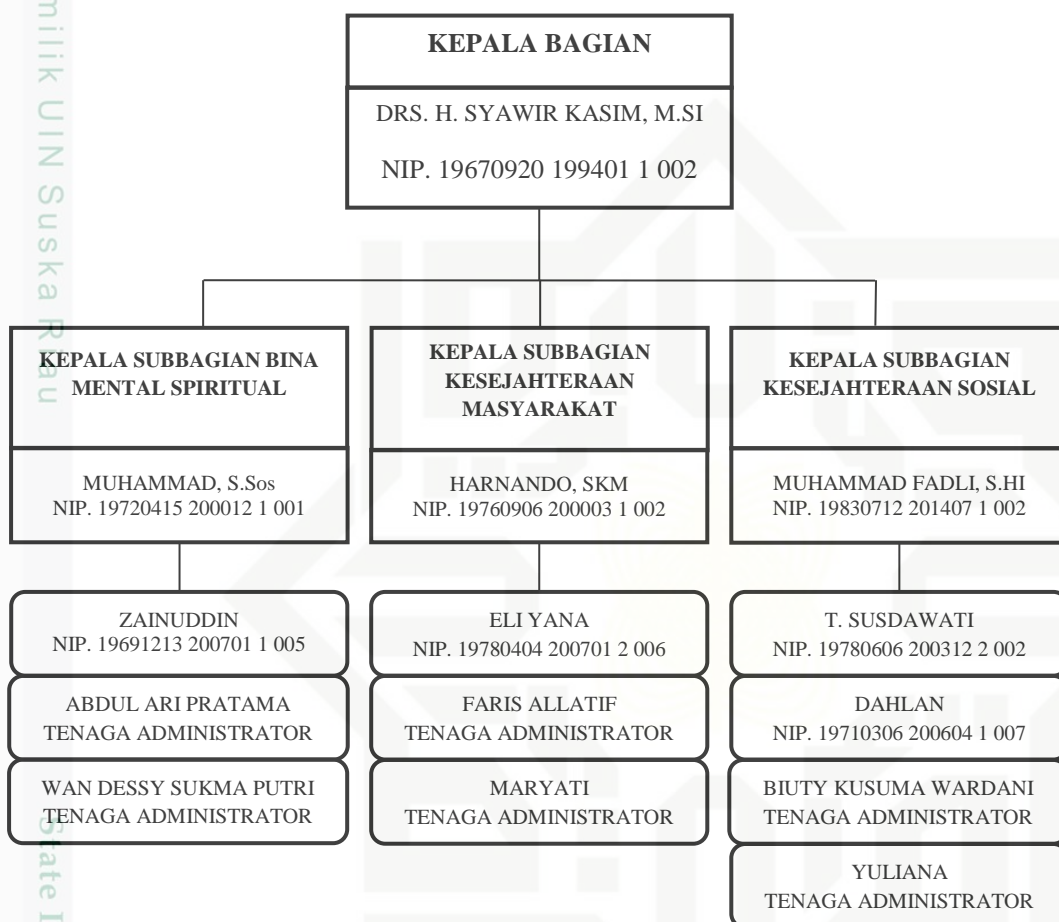
C. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat

Subbagian Kesejahteraan Masyarakat memiliki tugas, yaitu :

- a. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata
- d. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kemasyarakatan lainnya.

4.4.3 Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat



Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai 2021

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan bantuan beasiswa yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang di dapat berdasarkan indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn tentang indikator keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa ini masih belum baik. Mulai dari standar dan ukuran dimana tidak terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang lengkap beserta juknis dan hal lainnya dalam pemberian beasiswa, dan juga kesulitan pendaftar mengenai BDT tersebut dikarenakan kurangnya kejelasan informasi secara menyeluruh tentang persyaratan ini, hal tersebut seharusnya dapat dicantumkan secara *to the point* di dalam persyaratan. Kemudian sumber daya yang masih kurang baik dalam segi apapun, karakteristik agen pelaksana yang masih belum transparan kepada mahasiswa/i pendaftar, dan juga lingkungan sosial yang belum sepenuhnya memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan kebijakan karena persyaratan yang sulit dijangkau. Hambatan yang juga dirasa dalam implementasi kebijakan ini yaitu kurangnya sosialisasi terkait BDT/DTKS kepada masyarakat, kuota penerima beasiswa yang kurang sebab keterbatasan anggaran, dan sulitnya mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar Kota Dumai dalam pengantaran berkas.

6.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan agar menjadi masukan terkait implementasi kebijakan pemberian beasiswa ini, yaitu :

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat seharusnya mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Beasiswa beserta juknis yang lengkap agar setiap kegiatan lebih terarah, terukur, dan transparan bukan hanya SOP tetapi juga pembuatan jadwal kegiatan agar mahasiswa/i yang mengurus beasiswa tidak kebingungan dan merasa digantung tanpa kejelasan waktu. Berikut penulis menyarankan contoh yang dapat digunakan oleh Bagian Kesejahteraan rakyat dalam memberikan informasi kepada mahasiswa/i terkait jadwal kegiatan pemberian beasiswa.

JADWAL KEGIATAN PEMBERIAN BEASISWA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Diharapkan Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku pelaksana tugas pemberian beasiswa dapat lebih menyediakan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dalam bentuk web terhadap informasi-informasi terkait segala hal tentang beasiswa ini kepada masyarakat, baik mengenai anggaran beasiswa, pendapatan yang diterima per mahasiswa/i, jadwal kegiatan dan lama hari kerja yang dibutuhkan perkegiatan, jumlah kuota yang disediakan dan hal lainnya yang memang sudah seharusnya menjadi konsumsi publik dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan jelas.
3. Sebaiknya Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat memberikan pelatihan terhadap pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat yang sudah ada untuk meningkatkan kualitasnya di bidang (Informasi Teknologi) IT atau menambah pegawai yang memiliki *skill* di bidang (Informasi Teknologi) IT agar dapat membuat sistem baru berbasis web khusus beasiswa yang lebih ringkas dan sistematis, sehingga pendaftaran mendapatkan informasi yang lengkap di dalam sistem baru tersebut dan pengiriman berkas dapat dilakukan secara online sesuai dengan kategori pendidikan mahasiswa/i pendaftar.
4. Diperlukan kerjasama dan koordinasi antara pihak Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai dengan Dinas Sosial Kota Dumai, seperti mengadakan rapat atau pertemuan yang membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan sosialisasi tentang DTKS/BDT kepada masyarakat agar masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan lebih aktif mendaftarkan diri dan dapat terdaftar di BDT/DTKS sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan sosial dalam jenis apapun termasuk mengenai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa/i yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan biaya pendidikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdorrakhman G. 2011. *Esensi Praktis Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Humaniora
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- _____. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Antory Hussein, Ahmad. 2008. *Pembentukan Policy Awam 1st Edition*. Utusan Publications dan Distributors, Kuala Lumpur.
- Azahar A, Muhammad. 2014. *Sustainable Solid Waste Management in Malaysia: The Concept of Multi-Stakeholder Governance in Solid Waste Policy Implementation*. Journal of Public Policy and Administration Research, 4(10), 26-27.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. Moh. Roqib, M. Ag. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LkiS
- Dye, T. R. 2002. *Understanding Public Policy*, 10th edition, Prentice-Hall, New Jersey.
- Fitri, Dahlena D. 2017. *Peran Pemerintah Daerah dalam Sektor Pendidikan: (Bantuan Beasiswa terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2016)*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iman Abdul. A, Muhammad. 2019. *"Implementasi Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang*. Skripsi dipublikasikan. Indralaya: Universitas Sriwijaya.

Iskandar J. 2012. *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.

Mamik & Syaruf, Usman. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Mardikanto & Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Muhammad, Amir & Rola, P.A. 2018. *A Study Policy Implementation of Waste Management in Konawe Regency-Indonesia*. Journal of Sustainable Development, 11(1), 92-93.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta

Ndaraha, Talizuduhu. 2003. *KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik* (Edisi ke-5). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

_____. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nursalim. 2018. *Implementasi Kebijakan tentang Pemungutan Retribusi Pasar oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.*

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu asal Kota Dumai

Purnamasari, Hanny & Aditya. P, Bayu. 2017. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.*

Rahmawati. 2016. *Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2010-2014 (Studi Penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang).*

Santie, J. K & Wahono, A. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado.*

Sastro, A. Dhono. dkk. 2010. *Mengenenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.* Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Setiiani, Raden D. 2018. *Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Pandeglang.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sihombing, Danton. 2011. *Tipografi dalam Desain Grafis*. Jakarta: Gramedia.

Siyoto, Sandu & Sodik, M. A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Tambunan, Rudi. M. 2013. *Pedoman Penyusunan Standar Operating Procedures (SOP)*. Jakarta: Maistas Publishing,

Wahab, Solichin. A. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Perumusan Hingga Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

_____. 2014. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan model-Model Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

_____. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPS

Wirman S & Irawan S. 2008. *Implementasi Kebijakan & Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqa Prin



Yahya, Ardy. 2019. *“Analisis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Di Kota Pekanbaru”*. Skripsi tidak dipublikasikan. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Yandari, Lara I. 2019. *Implementasi Kebijakan Peraturan Wali kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

“Implementasi Kebijakan Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai”

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berfikir, maka pertanyaan untuk penelitian yang diajukan yaitu sebagai berikut :

Key Informan : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai

A. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Standar/Ukuran

- 1) Apakah pelaksana mempunyai Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program bantuan beasiswa ini?
- 2) Siapa kelompok sasaran dari program kebijakan ini?
- 3) Seberapa mudah persyaratan dapat dijangkau oleh kelompok sasaran?

B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

- 1) Apakah SDM yang ada sudah mencukupi? Dan bagaimana kemampuan implementor dalam pelaksanaan bantuan beasiswa?
- 2) Apakah terdapat pelatihan ataupun penilaian kinerja sebagai peningkatan kualitas SDM?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sumber Daya Finansial

- 1) Apakah anggaran dana beasiswa yang disediakan sudah mencukupi? Atau mengalami kekurangan?
- 2) Apakah ada terjadi kendala mengenai keuangan dalam pelaksanaan kebijakan?

3. Sumber Daya Waktu

- 1) Apakah *road map* dalam pelaksanaan kebijakan sudah jelas diberikan kepada masyarakat terutama pendaftar?

C. Karakteristik Agen Pelaksana

1. Bagaimana struktur birokrasi dalam pelaksanaan bantuan beasiswa ini?
2. Bagaimana dengan pembagian tugas dan tanggung jawab tiap bagian?
Apakah sudah sesuai bidangnya masing-masing?

D. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

1. Apakah setiap staf pelaksana sudah memahami tentang kebijakan dan bagaimana pengimplementasian kebijakan bantuan beasiswa ini?
2. Bagaimana tanggapan setiap staf pelaksana terhadap kebijakan ini?
3. Bagaimana integritas tanggapan para pelaksana terhadap implementasi kebijakan bantuan beasiswa ini?

E. Komunikasi antar Organisasi dan Aktifis Pelaksana

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam implementasi bantuan beasiswa ini, dan siapa saja yang terlibat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Sosial mengenai BDT?

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial. Dan Politik

1. Bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai implementasi kebijakan beasiswa ini?
2. Apakah elite pemerintah mendukung implementasi kebijakan ini?





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

“Implementasi Kebijakan Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai”

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berfikir, maka pertanyaan untuk penelitian yang diajukan yaitu sebagai berikut :

Key Informan : Mahasiswa/i Pendaftar Beasiswa Kota Dumai

1. Apa Pekerjaan orang tua anda?
2. Bagaimana respon orang tua anda terhadap bantuan beasiswa ini?
3. Apakah *road map* mengenai pelaksanaan bantuan beasiswa ini sudah jelas?
4. Apakah ketentuan dan persyaratan yang dihadirkan pemerintah mudah untuk dijangkau?
5. Apakah informasi-informasi mengenai segala hal yang terkait beasiswa ini sudah jelas dan transparan?
6. Berapa besaran dana bantuan beasiswa dari pemerintah Kota Dumai yang anda terima?
7. Menurut anda, apakah keluaran kebijakan bantuan beasiswa dapat membantu dalam hal perekonomian anda dan keluarga?
8. Apa saja hambatan yang muncul dalam proses pendaftaran bantuan beasiswa ini?
9. Apa harapan anda terhadap implementasi kebijakan bantuan beasiswa ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai



2. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan Koordinator Daerah Dinas Sosial Kota Dumai



4. Wawancara Dengan Pendaftar Beasiswa Pemerintah Kota Dumai

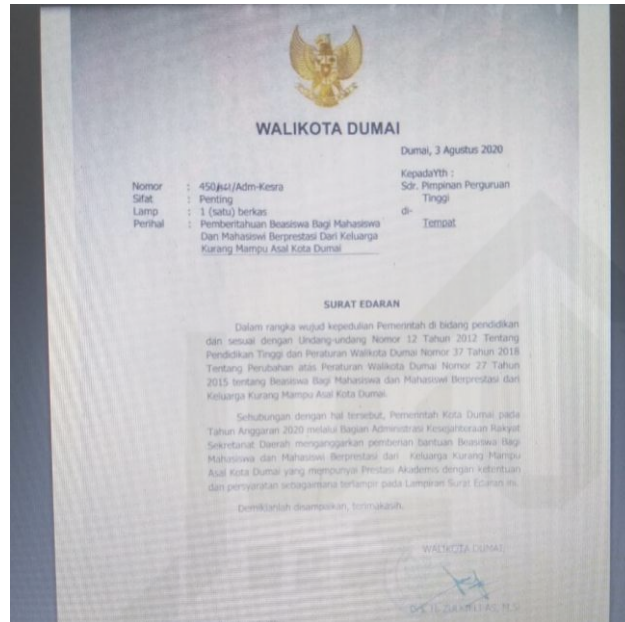




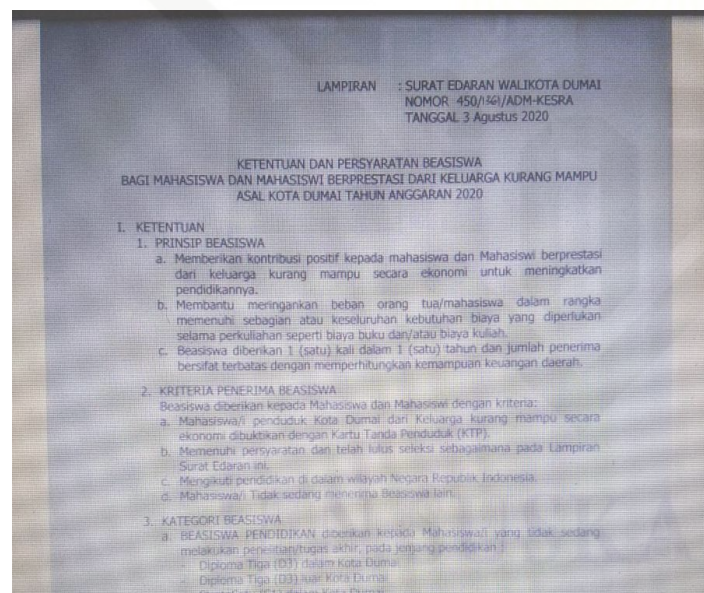
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Surat Edaran Walikota Dumai Perihal Pemberitahuan Beasiswa



6. Ketentuan dan Persyaratan Beasiswa



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa



8. Pengumuman Kelulusan Beasiswa

PENGUMUMAN DATA BERKAPITULASI KELULUSAN BEASISWA
MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU ABAS KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT PERGURUAN TINGGI	IPK
1	2	3	4	5	6	7
D3 PENDIDIKAN DALAM KOTA DUMAI						
1	NATALIA TAMBUKAN	DUMAI, 23 DESEMBER 2000	JL. KESUMA, GG. SETIA	AMIK DUMAI	JL. UTAMA KARYA BUKTI BATHEM	3.94
2	KARTIKA ARTUTI	DUMAI, 14 APRIL 2000	JL. GUNUNG LEQSER NO. 141	AMIK DUMAI	JL. UTAMA KARYA BUKTI BATHEM	3.90
3	RIDHO HIDAYAT	DUMAI, 23 MARET 2001	JL. SEI TERAS GG. BAHAGIA	AMIK DUMAI	JL. UTAMA KARYA BUKTI BATHEM	3.82
4	WIDNA DWI PUSPITA	DUMAI, 25 AGUSTUS 2001	JL. HIDAYAT NO.04	STIE TUAH NEGERI DUMAI	JL. BENTAN NO. 48 DUMAI	3.76
5	NURSUMADANI	DUMAI, 14 DESEMBER 1999	JL. BANGUN SARI	AMIK DUMAI	JL. UTAMA KARYA BUKTI BATHEM	3.71
D3 PENDIDIKAN LUAR KOTA DUMAI						
1	DIAN NUR HASANAH	DUMAI, 15 NOVEMBER 2000	JL. TERATAI GG. CENDANA NO.58	POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	JL. BATHIN ALAM, SUNGAI ALAM BENGKALIS	3.86
2	JASRIAN MAULANA	DUMAI, 11 JANUARI 2001	JL. HANGTUH NO.04	POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	JL. BATHIN ALAM, SUNGAI ALAM BENGKALIS	3.76
3	DOLI WE HONG LEE MARHUN	DUMAI, 11 SEPT 1998	JL. AIR BERSEH GG. SEPATAN KEL. TELUK BENJAI	POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI	JL. MEDAN TENGGARA VII, MEDAN TENGGARA	3.65
4	M. NOOR KHAFET	DUMAI, 31 MARET 2001	JL. TUANKU TAMBUSAI KM.7 DUMAI SELATAN	POLITEKNIK CALTEX ISAU	JL. UMHANNARI NO. 01 RUMAH	3.64
5	BENJAMIN	DUMAI, 7 AGUS 1999	JL. TANJUNG SARI KEL. TANJUNG PILAS	POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	JL. BATHIN ALAM, SUNGAI ALAM BENGKALIS	3.56
6	ANGGITA ARI SEPTIANE	DUMAI, 22 SEPTEMBER 2001	JL. JENDER BUNTHO GG. KAPUA NO.62 RT.03 KEL. JAYA MUKTI KEC. DUMAI TIMUR	POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	JL. BATHIN ALAM, SUNGAI ALAM BENGKALIS	3.49
D3 TUGAS AKHIR DALAM KOTA						

9. Alur Pendaftaran BDT/DTKS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DARI
KELUARGA KURANG MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Dumai tahun 2015 Nomor 21 Seri E);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 21 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai beserta perangkat daerah unsur penyelenggaraan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Kementerian Sosial adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Dumai.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kota Dumai yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun guna memenuhi kebutuhan perkuliahan.
 9. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan tinggi yang berasal dari daerah.
 10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau Swasta.
 11. Prestasi Akademis adalah hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di perguruan tinggi yang bersifat kognitif yang ditentukan melalui pengukuran dan penilaian berdasarkan nilai indek prestasi kumulatif minimal 3,0 (tiga koma nol) dengan memperhitungkan akreditasi perguruan tinggi pemohon.
 12. Pemohon adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.
 13. Basis data terpadu adalah sebuah sistem (database) yang digunakan untuk bahan perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
 14. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program jaminan kesehatan bersifat nasional berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang/warga Negara yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III KETENTUAN DAN JENIS BEASISWA

Pasal 3

- (1) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi akademis dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
 - (2) Kriteria keluarga kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah:
 - a. terdaftar pada basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial; dan/atau
 - b. terdaftar pada program bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Beasiswa dianggarkan dan dilaksanakan pada program/kegiatan OPD dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan APBD.
- (2) Penetapan penerima dan besaran beasiswa yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Penyaluran beasiswa dilakukan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 Agustus 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 7 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 21 SERI E



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 484 /ADM-KESRA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI KEGIATAN PENYEDIAAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA DAN MAHASISWI BERPRESTASI
DARI KELUARGA KURANG MAMPU ASAL KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi mahasiswa dan mahasiswi berprestasi berasal dari keluarga kurang mampu, Pemerintah Kota Dumai melaksanakan penyediaan beasiswa bagi mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penyediaan beasiswa bagi mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu asal Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan optimal, perlu dibentuk Panitia Seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Seleksi Kegiatan Penyediaan Beasiswa Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 21 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 21 Seri E);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 8 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 8 Seri A);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI KEGIATAN PENYEDIAAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN MAHASISWI BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU ASAL KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Kegiatan Penyediaan Beasiswa Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun dan mengumumkan persyaratan beasiswa kepada masyarakat dan pihak terkait;
b. menerima dan melakukan registrasi berkas permohonan
c. melakukan seleksi terhadap berkas permohonan yang diajukan;
d. mengawasi pelaksanaan proses penyediaan beasiswa;
e. melaporkan hasil seleksi kepada Walikota Dumai;
f. mengumumkan hasil seleksi;
g. melakukan tugas-tugas lain demi kelancaran proses beasiswa; dan
h. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Walikota Dumai melalui Sekretaris Daerah Kota Dumai.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Seleksi Kegiatan Penyediaan Beasiswa Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 Juli 2020

WALIKOTA DUMAI,


ZULKIFLI AS

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.
2. Inspektur Kota Dumai di Dumai.



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 499/ADM-KESRA/2020

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI KEGIATAN PENYEDIAAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN MAHASISWI BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU ASAL KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020

PANITIA SELEKSI KEGIATAN PENYEDIAAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN MAHASISWI BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU ASAL KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	WALIKOTA DUMAI	PENGARAH
2.	WAKIL WALIKOTA DUMAI	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI	PENANGGUNGJAWAB
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	KOORDINATOR
5.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	KETUA
6.	KEPALA SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	WAKIL KETUA
7.	KEPALA SUBBAGIAN KEAGAMAAN BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
8.	KEPALA SUBBAGIAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
9.	PELAKSANA GOLONGAN III BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (ETIMASARAH, S.Sos)	ANGGOTA
10.	PELAKSANA GOLONGAN II BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (T. SUSDAWATI)	PETUGAS VERIFIKASI DATA
11.	PELAKSANA GOLONGAN II BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (RONY SURYA)	PETUGAS INPUT DATA
12.	PELAKSANA GOLONGAN II BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (JERRY BUNGSU)	PETUGAS INPUT DATA
13.	PELAKSANA GOLONGAN II BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (DAHLAN)	PETUGAS ADMINISTRASI DATA
14.	PELAKSANA GOLONGAN II BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (ZAINUDDIN)	PETUGAS ADMINISTRASI DATA
15.	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (YULIANA)	PEMBANTU PANITIA
16.	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (MARYATI)	PEMBANTU PANITIA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	2	3
17.	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (ABDUL ARI PRATAMA)	PEMBANTU PANITIA
15.	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (BIUTY KUSUMA WARDANI, S.A.P)	PEMBANTU PANITIA

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 485/ADM-KESRA/2020

TENTANG

BESARAN BANTUAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA DAN MAHASISWI BERPRESTASI
DARI KELUARGA KURANG MAMPU ASAL KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Besaran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 21 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 21 Seri E);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 8 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 8 Seri A);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN MAHASISWI BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU ASAL KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Besaran Beasiswa Bagi Mahasiswa Dan Mahasiswi Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai Tahun Anggaran 2020, dengan besaran sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. beasiswa pendidikan:

1. Diploma 3 (D3) di Kota Dumai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. D3 di luar Kota Dumai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Strata 1 (S1) di Kota Dumai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
4. S1 di luar Kota Dumai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

b. beasiswa tugas akhir:

1. D3 di Kota Dumai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. D3 di luar Kota Dumai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. S1 di Kota Dumai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
4. S1 di luar Kota Dumai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

: Besaran Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dianggarkan pada Kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai.

: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020.

: Keputusan Walikota tentang Besaran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 Juli 2020

WALIKOTA DUMAI,


ZULKIFLI AS

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.
2. Inspektur Kota Dumai di Dumai.

UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN : SURAT EDARAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 450/161/ADM-KESRA
TANGGAL 3 Agustus 2020

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA DAN MAHASISWI BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU
ASAL KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020**

KETENTUAN

1. PRINSIP BEASISWA

- Memberikan kontribusi positif kepada mahasiswa dan Mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk meningkatkan pendidikannya.
- Membantu meringankan beban orang tua/mahasiswa dalam rangka memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan biaya yang diperlukan selama perkuliahan seperti biaya buku dan/atau biaya kuliah.
- Beasiswa diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan jumlah penerima bersifat terbatas dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

2. KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa dan Mahasiswi dengan kriteria:

- Mahasiswa/i penduduk Kota Dumai dari Keluarga kurang mampu secara ekonomi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Memenuhi persyaratan dan telah lulus seleksi sebagaimana pada Lampiran Surat Edaran ini.
- Mengikuti pendidikan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- Mahasiswa/i Tidak sedang menerima Beasiswa lain.

3. KATEGORI BEASISWA

- BEASISWA PENDIDIKAN diberikan kepada Mahasiswa/i yang tidak sedang melakukan penelitian/tugas akhir, pada jenjang pendidikan :

- Diploma Tiga (D3) dalam Kota Dumai
- Diploma Tiga (D3) luar Kota Dumai
- Strata Satu (S1) dalam Kota Dumai
- Strata Satu (S1) luar Kota Dumai

- BEASISWA TUGAS AKHIR diberikan kepada Mahasiswa/i yang sedang melakukan penelitian/tugas akhir, pada jenjang pendidikan :

- Diploma Tiga (D3) dalam Kota Dumai
- Diploma Tiga (D3) luar Kota Dumai
- Strata Satu (S1) dalam Kota Dumai
- Strata Satu (S1) luar Kota Dumai

4. TEKNIS PENGAJUAN BEASISWA

- Berkas permohonan dijilid dengan kertas jilid warna sbb :

- Jilid warna biru untuk Beasiswa D3 Pendidikan dalam Kota Dumai;
- Jilid warna merah untuk Beasiswa D3 Pendidikan luar Kota Dumai;
- Jilid warna hijau untuk Beasiswa S1 Pendidikan dalam Kota Dumai;
- Jilid warna kuning untuk Beasiswa S1 Pendidikan luar Kota Dumai;
- Jilid warna putih untuk Beasiswa D3, S1 Tugas Akhir dalam Kota Dumai dan luar Kota Dumai.



- b. Berkas permohonan disampaikan langsung ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai, dengan alamat Kantor Walikota Dumai Lt.II, Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar mulai tanggal 10 Agustus s/d 10 September 2020 (hari dan jam kerja).
- c. Berkas permohonan akan diseleksi oleh Panitia Seleksi di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- d. Proses seleksi dilaksanakan dengan sistem rangking yaitu permohonan disusun berdasarkan dari permohonan mahasiswa/i yang mempunyai nilai IPK tertinggi dari perguruan tinggi yang mempunyai nilai akreditasi terbaik (akreditasi institusi) dan seterusnya hingga batas jumlah penerima yang dianggarkan (kuota).
- e. Berkas permohonan beasiswa yang lulus seleksi dan masuk dalam batas jumlah penerima yang dianggarkan (kuota) akan diumumkan melalui website www.dumai.go.id

II. PERSYARATAN BEASISWA

A. BEASISWA PENDIDIKAN, melampirkan :

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Walikota Dumai (sesuai format terlampir).
2. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan (asli) sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai pada pasal 3 ayat 2 poin a dan b;
3. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Pimpinan Akademi/Perguruan Tinggi (asli);
4. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai;
6. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (yang masih berlaku) yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
7. Kartu Hasil Studi (KHS)/Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir oleh pihak berwenang, dengan IPK Minimal 3.00 (tiga titik nol nol);
8. Fotocopy Lembaran Akreditasi Perguruan Tinggi/Akademi yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/Akademi;
9. Menandatangani Pakta Integritas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan format terlampir; dan
10. Fotocopy rekening bank Riau Kepri atas nama mahasiswa yang bersangkutan (dilegalisir pihak bank).

B. BEASISWA TUGAS AKHIR, melampirkan :

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Walikota Dumai (sesuai format terlampir).
2. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan (asli) sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai pada pasal 3 ayat 2 poin a dan b;
3. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Pimpinan Akademi/Perguruan Tinggi (asli);
4. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau;

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau;



5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai;
6. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (yang masih berlaku) yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
7. Kartu Hasil Studi (KHS)/Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir oleh pihak berwenang, dengan IPK Minimal 3.00 (tiga titik nol nol);
8. Fotocopy Lembaran Akreditasi Perguruan Tinggi/Akademi yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/Akademi;
9. Menandatangani Pakta Integritas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan format terlampir; dan
10. Foto copy rekening bank Riau Kepri atas nama mahasiswa yang bersangkutan (dilegalisir pihak bank).
11. Fotocopy Surat Keterangan Penelitian/Magang dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan (dilegalisir pihak Lembaga Pendidikan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Universitas Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/3148/2021 Pekanbaru, 01 Juli 2021 M
 Sifat : Biasa 21 Zulqaidah 1442 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si.
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Mutia Thahirah
 NIM : 11775201299
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: **"Implementasi Kebijakan Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP 19751112 199903 2 001

Tembusan:
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: Un.04/F.VII.I/PP.00.9/3148/2021
: Biasa
: -
: **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 01 Juli 2021 M
21 Zulqaidah 1442 H

Kepada
Yth. **Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Mutia Thahirah
NIM : 11775201299
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: **"Implementasi Kebijakan Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP 19751112 199903 2 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: Un.04/F.VII/PP.00.9/3118/2021
: Biasa
: -
: Izin Riset

Pekanbaru, 25 Juni 2021 M
15 Zulqaidah 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mutia Thahirah
NIM. : 11775201299
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Kebijakan Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai" Untuk
itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/42196
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3118/2021 Tanggal 25 Juni 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : MUTIA THAHIRAH
2. NIM / KTP : 11775201299
3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN BEASISWA PEMERINTAH KOTA DUMAI
7. Lokasi Penelitian : SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Jalan Puteri Tujuh Nomor 9, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur

DUMAI - RIAU

REKOMENDASI

Nomor : 071/VIII/2021/265

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, setelah membaca surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor :503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/42196 Tanggal 30 Juni 2021 dengan ini memberikan Rekomendasi yang dimaksud kepada :

Nama : **MUTIA THAHIRAH**
 Nomor Mahasiswa : 11775201299
 Program Study : Administrasi Negara
 Alamat : Jl. Pulau Mampu Gg. Permai Dumai - Riau
 Hp. 0822-8372-127

Untuk melakukan penelitian/pengumpulan data pada Sekretariat Daerah Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Skripsi dengan Judul:

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN BEASISWA PEMERINTAH KOTA DUMAI "

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat. Pelaksanaan penelitian dan pengambilan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Agustus s/d 13 November 2021.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Penelitian ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Dumai
 Pada 13 Agustus 2021

Pt KEPALA,



H. ASNAM, ST. M.Si
 NIP. 19651012 199903 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Dumai.
2. Sekretaris Daerah Kota Dumai
3. Ketua Program Studi Administrasi Negara Uin Suska Riau.
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai Telp. (0765) 4300009 Fax. (0765) 440093 Kode Pos 28882
DUMAI

e-mail : umum@dumaikota.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR : 01/KESRA/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Syawir Kasim, M.Si
NIP : 19670920 199401 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Mutia Thahirah
NIM : 11775201299
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Jl. Pulau Mampu Gg. Permai Dumai – Riau
Lokasi Penelitian : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kota Dumai

Telah melaksanakan penelitian di Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Dumai untuk memperoleh data guna penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai"

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat di pergunakan sebagaimana semestinya, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Dumai, 24 September 2021



Drs. H. SYAWIR KASIM, M. Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19670920 199401 1 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta milik UIN Suska Riau

RIWAYAT HIDUP

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Penulis bernama Mutia Thahirah. Lahir di Kota Dumai pada tanggal 03 Mei 1999 dan beragama Islam. Penulis merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara dari ayahanda Gusnaldi dan ibunda Titin Yeni. Pada tahun 2004 penulis memulai pendidikan pertama pada TK IT Jami'atul Muslimin Kota Dumai. Lalu melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 014 Buluh Kasap Kota Dumai dan tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 4 Kota Dumai dan tamat pada tahun 2014, lalu menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kota Dumai dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, dan melalui jalur PBUD penulis diterima menjadi mahasiswi pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada masa perkuliahan penulis pernah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Januari sampai Februari 2020 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai. Kemudian pada bulan Juli sampai Agustus 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Dumai tepatnya di Kecamatan Dumai Selatan.

Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 penulis melaksanakan Ujian Seminar Proposal, kemudian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 penulis melaksanakan Ujian Munaqasah. Penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.